

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG
TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jabatan dan unit organisasi pejabat/ pegawai yang melaksanakan proses beracara pada gugatan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan, perlu menyempurnakan daftar jabatan dan unit organisasi Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG TIM BERACARA DALAM
PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 135 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 MEI 2020

NAMA TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN
MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
1.	Setya Budi Arijanta S.H., KN NIP. 19701231 199503 1 001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc. NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Dr. Salusra Widya, MA NIP. 19610509 198812 1 001	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Dr. Robin Asad Suryo, MA NIP. 19650809 199003 1 001	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
5.	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
6.	Suharti, S.Psi., M.Si. NIP. 19730627 199803 2 002	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
7.	Iwan Herniwan, S.Si., MP. NIP. 19691106 199803 1 006	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak., MM. NIP. 19670410 198703 2 001	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	R.Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM NIP. 19660529 199201 1 001	Direktur Sertifikasi Profesi	Direktorat Sertifikasi Profesi
10.	Patria Susantosa, S.Si., M.Si. NIP. 19731201 200312 1 004	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
11.	Rinaldi Morintoh, S.H., M.kn. NIP. 19810509 201012 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
12.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
13.	Rasmita Juliana Sitepu, S.H. NIP. 19880709 201502 2 001	Kepala Subbagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
14.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, S.H. NIP. 19840621 201402 1 001	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
15.	Hilman Fazri, S.H. NIP. 19890312 201402 1 001	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
16.	Sari Melani, S.H. NIP. 19800224 201012 2 001	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
17.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
18.	Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. NIP. 19840208 201502 2 001	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
19.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199703 1 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
20.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
21.	Ardian Hoppin Sitompul, S.H. NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
22.	Benny Leopold Dumais, S.H. NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
23.	Muhammad Hanif Firnanda, S.H. NIP. 19940703 201801 1 003	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
24.	Syukri, S.H. NIP. 19921124 201801 1 001	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
25.	Asih Riska Nurmasari, S.H. NIP. 19940725 201902 2 005	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
26.	Cherish Shery Desarya, M.H. NIP. 19881220 201902 2 002	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
27.	Mega Chandra Sera, S.H. NIP. 19940614 201902 2 002	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
28.	Carolina Maria Anggreini, S.H. NIP. 19930113 201902 2 002	Analisis Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
29.	Yogie Prastiyans, S.H. NIP. 19910706 201902 1 002	Analisis Berkas Sengketa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
30.	Mahatmya Widyasri, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
31.	Faradita Utami Putri Sihite, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi

No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi
32.	Rayhan Maulana, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi, dan Pengembangan Sistemn Informasi
33.	Siti Fathia Rizki Sarkuti, S.H.	Staf Pendukung Unit Kerja	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
34.	Didi Nahtadi, S.Sy	Staf Pendukung Unit Kerja	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO